

**PENGARUH PENDUDUK, PDRB PERKAPITA, DAN HOTEL
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA DI
SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
kepada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

TOMO PRAMANA PUTRA

2016/16060117

**ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2020

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH PENDUDUK, PDRB PERKAPITA DAN HOTEL TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK DAERAH KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT

Nama : Tomo Pramana Putra
Bp/Nim : 2016/16060117
Keahlian : Ekonomi Publik
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Fakultas : Ekonomi

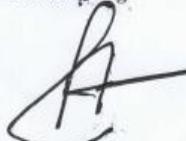
Padang, februari 2021

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Melti Roza Adry, S.E., M.E.
NIP. 19830505 200604 2 001

Disetujui oleh :
Pembimbing



Drs. Alianis, Ms
NIP. 19591129 198602 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

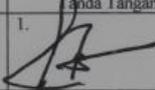
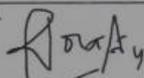
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

**PENGARUH PENDUDUK, PDRB PERKAPITA DAN HOTEL
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI SUMATERA BARAT**

Nama : Tomo Pramana Putra
NIM/TM : 16060117/2016
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Januari 2021

Tim Penguji :

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Drs. Alianis, MS	1. 
2.	Anggota	Drs. Zul Azhar, M.Si	2. 
3.	Anggota	Melty Roza Adry, S.E, M.E	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tomo Pramana Putra
Nim/Th. Masuk : 16060117/2016
Tempat/ Tanggal Lahir : Padang, 23 April 1996
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Pasir Kandang, RT03 RW09 Kel, Pasir Nan Tigo. Kec, Koto
Tangah. Kota Padang
No. HP/ Telephone : 082386596393
Judul Skripsi : Pengaruh Penduduk, PDRB Perkapita dan Hotel Terhadap
Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/ skripsi ini adalah hasil dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di UNP maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/ skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Pada karya tulis / skripsi ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan daftar pustaka.
4. Karya tulis/ skripsi ini **Sah** apabila telah ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh- sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/ skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi.

Padang, 23 Oktober 2020

Pramana Putra
NIM : 16060117 / 2020

ABSTRAK

Tomo Pramana Putra (2016/16060117) : Pengaruh Penduduk, PDRB Perkapita dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera barat. Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang, Dibawah Bimbingan Bapak Drs. Ali Anis, MS

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penduduk, PDRB perkapita dan hotel terhadap penerimaan pajak daerah kabuapten/kota di sumatera barat. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang berupa regresi panel di 19 kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. Sumber data ini yaitu dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penduduk (X1), PDRB Perkapita (X2) dan Hotel (X3). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) Model Regresi Panel (2) Uji Asumsi Klasik (3) Uji t (4) Uji f. hasil penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa (1) Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di sumatera barat. (2) PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di sumatera barat. (3) Jumlah hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah kabupaten/kota di sumatera barat.

Kata Kunci : Penerimaan Pajak, Penduduk, PDRB Perkapita, Hotel.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak terhadap hamba-Nya serta shalawat untuk nabi Muhammad SAW. Dengan rahmat dan izin Allah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB Perkapita dan Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera barat”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat teratasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan kepada Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku pembimbing penulis yang telah sabar, tekun, dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

Selanjutnya ucapan terimakasih penulis sampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

2. Ibu Melti Roza Adry, S.E, M.E selaku ketua jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Dewi Zaini Putri, S.E, M.M selaku sekretaris jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Bapak Drs. Ali Anis, MS selaku Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan penuh sabar mendengar keluhan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terimakasih kepada Dosen Penguji (1) Drs. Zul Azhar, M.Si dan dosen penguji (2) Melti Roza Adry, SE. ME pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha dan Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga serta doa, dukungan, dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Kepada sahabat-sahabat saya yaitu semua teman Ota Lapau, Mutia, Aufa, Uun, Dika dan Diana Aprilia yang selalu memberikan dukungan dan selalu motivasi atas terselesaikannya skripsi ini.
10. Kepada rekan-rekan Jurusan Ilmu Ekonomi angkatan 2016 tanpa terkecuali
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan, sehingga penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Padang, Mei 2021

Peneliti,
Tomo Pramana Putra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS	14
A. Kajian Teori	14
1. Keuangan Daerah.....	14
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	18
3. Pajak Daerah.....	20
4. Tolak Ukur Menilai Hasil Pajak Daerah.....	24
5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah.....	25
A. Penelitian Terdahulu	29
B. Kerangka Konseptual	33
C. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis dan Sumber Data	37
B. Tempat dan Waktu Penelitian	37
C. Variabel Penelitian.....	38
1. Variabel bebas (independent variabel).....	38
2. Variabel Terikat (Dependent Variabel)	39
D. Model Penelitian	39
E. Metode Analisa	Error! Bookmark not defined.
F. Pemilihan Model.....	Error! Bookmark not defined.

G. Uji Asumsi Klasik.....	Error! Bookmark not defined.
H. Uji Statistik	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	47
1. Keadaan Geografis Provinsi Sumatera Barat.....	47
2. Kondisi Penerimaan Pajak Daerah di Sumatera Barat.....	48
B. Deskripsi Variabel Penelitian.....	49
C. Analisa Induktif	58
1. Uji Pemilihan Model Data Panel	58
2. Uji Regresi Panel	60
3. Koefisien Determinasi	62
4. Uji Asumsi Klasik.....	62
D. Pembahasan Hasil Penelitian	64
1. Pengaruh Jumlah Penduduk Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	64
2. PDRB Perkapita Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	66
3. Jumlah Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah.....	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
A. KESIMPULAN.....	69
B. SARAN	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....	73
LAMPIRAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat Menurut (ribu rupiah) Tahun 2014-2018.....	3
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk (orang) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018	5
Tabel 1. 3. Jumlah PDRB Perkapita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018.	7
Tabel 1. 4. Jumlah Akomodasi Hotel Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Konseptual.....	36
---------------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data penelitian.....	76
Lampiran 2. Hasil Uji Chow (<i>Likelihood Ratio Test</i>)	84
Lampiran 3. Hasil Uji Hausmant	84
Lampiran 4. Hasil Uji FEM (<i>Fixed Effect Model</i>)	85
Lampiran 5. Hasil Uji Random Effect Model (REM).....	86
Lampiran 6. Tabel Uji t-Statistik	87
Lampiran 7. Tabel Uji f- Statistik	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia telah lama menetapkan suatu perencanaan dalam membangun suatu Negara, dimana diantaranya dengan cara mewajibkan kepada seluruh warga Negara akan membayar pajak, baik itu pajak penghasilan maupun pajak akan kendaraan dan lain sebagainya. Setiap warga Negara wajib mengikuti dan mematuhi seluruh aturan yang telah dibuat oleh pemerintah, jika ada warga yang dengan sadar tidak membayar kewajibannya maka akan dijatuhkan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Sumber-sumber keuangan daerah yang digunakan untuk membiayai APBD yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan oleh pemerintah daerah dan juga memberikan gambaran terkait mengenai kesanggupan suatu daerah dalam membiayai segala bentuk kegiatan yang diselenggarakan artinya pemerintah disuatu daerah tersebut haruslah serius dan bekerja keras dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penerimaan pajak merupakan hal yang umum sebagai salah satu sumber dari penerimaan pendapatan bagi suatu daerah yang juga berlaku bagi daerah lainnya. Hampir disetiap daerah mengenakan pajak kepada setiap warganya. Di Sumatera Barat pajak merupakan salah satu penerimaan daerah yang cukup besar kontribusinya bagi pembangunan daerah dengan kata lain pajak merupakan penerimaan pajak yang diperoleh berguna untuk pelaksanaan maupun peningkatan pembangunan untuk terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Pandiangan,2008:5). Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota dimana terdapat 12 Kabupaten dan 7 Kota. Semua daerah terdapat penghasilan atau pendapatan daerah yang beraneka ragam, Pendapatan Asli Daerah terhadap Penerimaan Keuangan Daerah di tiap Kabupaten/Kota di Sumatera barat masih relative rendah dari tahun ke tahun, maka dari itu pemerintah perlu lebih bekerja keras lagi demi meningkatkan Pendapatan Asli daerah di tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

Salah satu Komponen Pendapatan Asli Daerah yang yang berkontribusi besar untuk pemasukan didaerah yaitu pendapatan hasil pajak. Pajak daerah yaitu hasil yang didapatkan dan bisa diperbesar melalui perintah-perintah pajak dan ditetrapkan daerah berguna bagi kepengtingan kebutuhan pembangunan pemerintah tersebut (Syofian, 1997). Penerimaan pajak tersebut tidak terlepas pada kontribusi-kontribusi yang merupakan sumber dari penerimaannya.

Sumber dari penerimaan pajak pada penelitian ini mengkaji seberapa besar pengaruh penduduk, PDRB perkapita dan hotel terhadap penerimaan pajak di Sumatera Barat, karena penerimaan pajak disuatu daerah Kabupaten/Kota di

Sumatera Barat berbeda-beda, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Penerimaan pajak di daerah disetiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat juga terbilang cukup rendah pertahunnya, maka disinilah letak permasalahan dalam penelitian ini dan juga permasalahan bagi pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Barat. Terkait variabel yang peneliti lakukan yaitu salah satunya membahas tentang jumlah hotel disetiap Kabupaten/Kota, tentunya tidak semua Kabupaten/Kota yang memiliki hotel didaerahnya, namun peneliti disini membahas semua jenis hotel di Kabupaten/Kota di Sumatera Barat baik itu hotel berbintang maupun hotel melati. Hotel berbintang mungkin saja belum banyak Kabupaten/Kota yang memilikinya akan tetapi disetiap Kabupaten/Kota pasti memiliki hotel, setidaknya hotel melati, apalagi dizaman sekarang banyak tempat wisata didaerah tersebut maka tidak menutup kemungkinan daerah yang kurang maju akan membangun hotel untuk penginapan wisatawan. PDRB Perkapita yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, dan Jumlah Penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu total keseluruhan penduduk baik laki-laki maupun perempuan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Sumatera Barat Menurut (ribu rupiah) Tahun 2014-2018

No	Daerah	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
	Kabupaten					
1	Kep. Mentawai	64,049.00	1,914,099.00	2,528,058.00	2,647,327.00	3,750,000.00
2	Pesisir Selatan	15,591,934.00	14,420,455.00	13,712,856.00	18,504,781.00	20,998,586.00
3	Solok	7,751,848.00	10,848,119.00	11,441,155.00	14,717,757.00	17,518,108.00
4	Sijunjung	7,839,200.00	8,778,642.00	10,787,388.00	13,427,638.00	11,658,500.00
5	Tanah Datar	9,458,236.00	10,872,909.00	11,771,072.00	16,523,395.00	17,894,893.00
6	Padang Pariaman	23,382,194.00	23,040,824.00	26,922,241.00	36,853,311.00	40,900,000.00
7	Agam	17,200,430.00	19,121,913.00	21,399,033.00	27,494,004.00	31,465,146.00
8	Lima Puluh Kota	11,663,126.00	12,104,526.00	14,060,795.00	17,667,233.00	23,500,000.00
9	Pasaman	6,156,711.00	7,527,410.00	8,579,477.00	8,925,098.00	8,251,110.00
10	Solok Selatan	4,112,084.00	4,415,199.00	4,955,123.00	7,013,266.00	11,763,000.00
11	Dharmasraya	10,419,930.00	10,643,027.00	11,542,783.00	14,933,091.00	18,669,578.00
12	Pasaman Barat	19,889,826.00	13,362,575.00	13,693,331.00	17,966,272.00	20,816,262.00
	Kota					
13	Padang	194,620,517.00	232,870,240.00	256,746,612.00	327,916,583.00	400,911,615.00
14	Solok	5,383,370.00	6,319,834.00	6,787,365.00	8,338,597.00	7,982,927.00
15	Sawahlunto	4,190,395.00	4,101,043.00	4,686,268.00	5,337,144.00	5,749,853.00
16	Padang Panjang	5,388,063.00	5,556,825.00	6,134,347.00	6,906,484.00	7,925,000.00
17	Bukittinggi	27,314,134.00	29,002,139.00	30,709,690.00	38,282,140.00	46,068,135.00
18	Payakumbuh	10,591,499.00	10,765,420.00	11,033,692.00	14,047,192.00	16,572,700.00
19	Pariaman	4,839,642.00	5,961,977.00	6,646,520.00	8,304,791.00	8,826,754.00
	Jumlah	386,433,188.00	431,627,176.00	474,137,806.00	605,806,104.00	721,222,167.00

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)

Tebell.1 memperlihatkan realisasi penerimaan pajak Kabupaten/Kota Sumatera Barat tahun 2014-2018, pada kolom % PAD artinya yaitu seberapa besarkah persentase pajak daerah dari Penerimaan Asli Daerah. Terlihat pada tahun 2014 hingga tahun 2018 penerimaan pajak disetiap daerah Kabupaten/Kota selalu terjadi peningkatan di setiap tahunnya walaupun ada beberapa daerah yang ada naik turun penerimaan pajaknya. Penerimaan pajak tersebut menandakan bagaimana lancarnya dan bagusnya perekonomian di daerah tersebut.

Penerimaan pajak tertinggi yaitu terdapat pada Kota Padang, diantara beberapa daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya penerimaan pajak di Kota Padang ini disebabkan karena perekonomian yang lancar di Kota tersebut, karna Kota Padang adalah Ibukota Sumatera Barat dan pusat perekonomian juga di daerah tersebut. Akan tetapi, ini semua tidak lain juga karna gigihnya pemerintah daerah tersebut dalam menggali hasil dari pajak daerah. Sehingga penerimaan pajak selalu lancar yang nantinya juga akan berguna bagi kesejahteraan bersama.

Tabell.1 diatas juga memperlihatkan total keseluruhan penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan yang signifikan. Artinya secara keseluruhan di Provinsi Sumatera Barat penerimaan pajak daerah sudah bisa dikatakan berjalan dengan baik dan lancar.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk (orang) Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018

Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality	Jumlah Penduduk (orang) <i>Population (people)</i>				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kabupaten/ Regency					
1. Kep. Mentawai	83603	85295	86981	88692	90373
2. Pesisir Selatan	446479	450186	453822	457285	460716
3. Solok	361095	363684	366213	368691	371105
4. Sijunjung	218588	222512	226300	230104	233810
5. Tanah Datar	343875	344828	345706	346578	347407
6. Padang Pariaman	403530	406076	408612	411003	413272
7. Agam	472995	476881	480722	484288	487914
8. Lima Puluh Kota	365389	368985	372568	376072	379514
9. Pasaman	266888	269883	272804	275728	278480
10. Solok Selatan	156901	159796	162724	165603	168411
11. Dharmasraya	216928	223112	229313	235476	241571
12. Pasaman Barat	401624	410307	418785	427295	435612
Kota/ Municipality					
1. Padang	889561	902413	914968	927011	939112
2. Solok	64819	66106	67307	68602	69776
3. Sawahlunto	59608	60186	60778	61398	61898
4. Padang Panjang	50208	50883	51712	52422	52994
5. Bukittinggi	120491	122621	124715	126804	128783
6. Payakumbuh	125690	127826	129807	131819	133703
7. Pariaman	83610	84709	85691	86618	87626
Jumlah/ Total	5131882	5196289	5259528	5321489	5382077

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)

Jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu jumlah atau total keseluruhan gabungan dari laki-laki dan perempuan di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Berdasarkan Tabel 1.2 menurut Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa jumlah penduduk Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2018 berjumlah 5.382.077 orang, dimana Kota Padang memiliki jumlah penduduk yang paling banyak diantara Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 939.112 orang. Ini

diakibatkan karena Kota Padang sebagai ibukota Sumatera Barat dan merupakan pusat perekonomian Sumatera Barat dengan pembangunan infrastruktur yang lebih maju dibandingkan dengan daerah lain. Faktor inilah salah satu pendorong masyarakat untuk tinggal di Kota Padang sebagaimana yang terlihat pada tabel. 1 diatas.

Pada Tabel1.2 terlihat perkembangan atau pertumbuhan penduduk di setiap tahun di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Ini jelas sangat menarik sekali variabel tersebut diangkat untuk mengetahui dari pembahasan variabel pertama dari penelitian ini. Apakah berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak daerah atau malah sebaliknya yaitu berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah. Karna pemerintah pasti menginginkan bagaimana masyarakatnya dapat hidup sejahtera dan dengan perekonomian yang bagus, namun hal ini tidak akan terwujud jika hanya pemerintah yang menangani masalah ini. Pemerintah juga butuh bantuan kerjasama dengan masyarakatnya yaitu dengan cara mentaati segala aturan yang berlaku sebagai contoh yaitu dengan membayar pajak artinya kita ikut berpartisipasi dalam pembangunan daerah ke yang lebih baik, maju dan sejahtera.

Tabel 1.3 PDRB Perkapita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014-2018

No	Daerah	Tahun								Pertumbuhan
		2014	2015	Pertumbuhan	2016	Pertumbuhan	2017	Pertumbuhan	2018	
	Kabupaten/ Regency									
1	Kep. Mentawai	3027227,07	3395690,03	12,17%	3725729,38	9,72%	4089131,62	9,75%	4396978	7,53%
2	Pesisir Selatan	9113793,03	10197170,32	11,89%	11271401,87	10,53%	12521919	11,09%	13642649	8,95%
3	Solok	9408055,61	10165293,72	8,05%	11053489,5	8,74%	11979862	8,38%	12801373	6,86%
4	Sijunjung	6470699,67	6955425,78	7,49%	7439227,39	6,96%	7978030	7,24%	8515969	6,74%
5	Tanah Datar	9177539,5	9901482,39	7,89%	10734514,88	8,41%	11620385	8,25%	12392699	6,65%
6	Padang Pariaman	14152525,98	15845888,21	11,97%	17532873,46	10,65%	19182006	9,41%	20639267	7,60%
7	Agam	13917961,86	15247791,73	9,55%	16693045,25	9,48%	18219970	9,15%	19506487	7,06%
8	Lima Puluh Kota	10563709,21	11582971,5	9,65%	12677544,49	9,45%	13783488	8,72%	14738952	6,93%
9	Pasaman	5951254,78	6505370,04	9,31%	7335785,21	12,77%	8007885	9,16%	8529969	6,52%
10	Solok Selatan	3891123,97	4236186,58	8,87%	4598219,45	8,55%	4986736	8,45%	5302502	6,33%
11	Dharmasraya	7155333,63	7725469,65	7,97%	8437660,72	9,22%	9282449	10,01%	9917021	6,84%
12	Pasaman Barat	10703305,87	11712936,57	9,43%	12794249,97	9,23%	14068249	9,96%	14997418	6,60%
	Kota/ Municipality									
13	Padang	41265599,6	45092946,85	9,27%	49386263,76	9,52%	53868745	9,08%	58272341	8,17%
14	Solok	2729052,35	2964889,59	8,64%	3241245,94	9,32%	3554637	9,67%	3834561	7,87%
15	Sawahlunto	2513741,79	2715005,06	8,01%	2937954,38	8,21%	3213706	9,39%	3460847	7,69%
16	Padang Panjang	2347905,13	2533045,04	7,89%	2774050,1	9,51%	3027962	9,15%	3369385	11,28%
17	Bukittinggi	5635927,99	6169750,95	9,47%	6783086,09	9,94%	7453107	9,88%	8068882	8,26%
18	Payakumbuh	4180520,73	4654975,54	11,35%	5203120,37	11,78%	5757330	10,65%	6341897	10,15%
19	Pariaman	3406271,2	3699443,57	8,61%	4036741,93	9,12%	4386768	8,67%	4764684	8,61%
	Jumlah	165 611 548,96	181 301 733,12		198 656 204,15		216982364		233393881	
	Sumatera Barat	164 944 256,80	179 951 980,32		196 099 176,57		213889860		230528813	

Sumber :Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)

Pada Tabel 1.3 yaitu jumlah PDRB Perkapita menurut harga berlaku di daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Maksud dari PDRB Perkapita di atas yaitu adalah rata-rata pendapatan yang diterima oleh penduduk kabupaten dan kota. Pada tabel di atas dapat kita lihat bahwa PDRB Perkapita Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya mengalami peningkatan. Pada tahun 2018 wilayah atau daerah dengan PDRB Perkapita tertinggi yaitu di Kota Padang dengan jumlah PDRB perkapita sebesar 58.272.340,66. Tingginya pendapatan di Kota ini tidak lain disebabkan karena Kota Padang merupakan pusat perekonomian sekaligus ibukota Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi di Kota Padang lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya. Karena melihat selalu ada peningkatan PDRB Perkapita di daerah-daerah Sumatera Barat, tentu saja ada pertanyaan tentang bagaimana hasil dari variabel y terhadap PDRB tersebut. Ini tentunya sangat menarik dijadikan variabel dalam penelitian ini, apakah PDRB Perkapita berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak ataukah malah sebaliknya yaitu berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak daerah.

Setiap masyarakat pasti akan menginginkan apa yang terbaik untuk kesejahteraan daerahnya begitupun keinginan pemerintah daerah. Karena pendapatan masyarakat adalah salah satu sumber pendapatan daerah, yang diperoleh dari pajak perorangan pajak kekayaan dan lain sebagainya. Kita semua mengharapkan dengan selalu meningkatnya PDRB Perkapita di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat ini maka akan meningkatkan pula penerimaan pajak atau pendapatan daerah setempat.

Tabel 1.4
Akomodasi Hotel Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2014-2018

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Hotel/Hotel				
	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kabupaten/Regency					
01. Kepulauan Mentawai	12	12	12	37	37
02. Pesisir Selatan	16	17	17	51	51
03. Solok	5	7	7	8	8
04. Sijunjung	12	13	13	17	17
05. Tanah Datar	9	11	11	17	19
06. Padang Pariaman	8	6	6	12	12
07. Agam	30	26	26	29	29
08. Lima Puluh Kota	14	16	16	26	26
09. Pasaman	15	14	14	14	14
10. Solok Selatan	12	12	12	19	26
11. Dhamasraya	12	11	11	12	12
12. Pasaman Barat	19	17	17	20	20
Kota/ municipality					
13. Padang	94	93	96	128	128
14. Solok	5	6	6	6	6
15. Sawah Lunto	2	2	2	38	39
16. Padang Panjang	18	20	20	24	26
17. Bukittinggi	67	66	66	76	76
18. Payakumbuh	11	11	11	17	17
19. Pariaman	9	11	11	25	25
Sumatera Barat	370	371	374	576	588

Sumber: Badan Pusat Statistik Sumatera Barat (BPS Sumbar)

Jumlah hotel disini yaitu dalam artian total keseluruhan hotel baik itu hotel berbintang maupun melati yang ada di Kabupaten/Kota Sumatera Barat. Tabel 1.4 dapat dilihat bahwa jumlah akomodasi hotel di Sumatera Barat di tahun 2014-2018 mengalami terus mengalami peningkatan, peningkatan paling signifikan terjadi pada tahun 2016-2017 yaitu ditahun 2014 jumlah akomodasi hotel di Sumatera Barat sebanyak 374 dan meningkat menjadi 576 ditahun 2017. Akan

tetapi jika ditinjau perdaerah Kabupten/Kota laju pertambahan jumlah akomodasi hotel masih mengalami naik turun walaupun sebagian besar masih dominan pada peningkatan, terlihat pada Kabupaten Pasaman dari tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 15 hotel menjadi 14 hotel sampai 2018. Di Dhamasraya juga mengalami penurunan di tahun 2014-2016 yaitu hotel di 2014 berjumlah 12 turun menjadi 11 hotel ditahun 2015 dan 2016 kemudian naik lagi menjadi 12 hotel ditahun 2017 dan 2018. Pasaman Barat diitahun 2014 berjumlah 19 hotel dan turun menjadi 17 hotel ditahun 2015 dan tahun 2016, kemudian naik lagi menjadi 20 hotel ditahun 2017 dan tahun 2018. Kota Padang juga mengalami sedikit penurunan pada tahun 2015 yaitu jumlah hotel ditahun sebelumnya 94 hotel menjadi 93 hotel ditahun 2015. Kemudian Kota Bukittinggi juga mengalami penurunan dari 67 hotel ditahun 2014 menjadi 66 hotel ditahun 2015 dan 2016. Akibat terjadinya peningkatan dan penurunan jumlah hotel di tiap Kabupaten/Kota di Sumatera Barat maka seharusnya pemerintah memperhitungkan dan bekerja keras lagi bagaimana jumlah hotel terus meningkat karna salah satu Penerimaan Asli Daerah dipengaruhi oleh hotel.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas maka penulis tertarik membahas dan melakukan penellitian dengan judul **“Pengaruh Penduduk, PDRB Perkapita, dan Hotel Terhadap Pemasukan Pajak Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat ”**

B. Rumusan Masalah

Setelah latar belakang yang telah penulis jelaskan, jadi dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Sejauh mana pengaruh penduduk kepada penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Sejauh mana pengaruh PDRB Perkapita kepada penerimaan pajak Kabupaten/Kota di Sumatera barat
3. Sejauh mana pengaruh hotel kepada penerimaan pajak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah dapat kita ketahui tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penduduk terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PDRB Perkapita terhadap penerimaan pajak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh hotel terhadap penerimaan pajak Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan program strata satu pada Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
2. Dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah dalam mengatur Penerimaan Asli Daerah (PAD) dan memperbaiki serta membuat kebijakan-kebijakan disuatu daerah tersebut.

3. Diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti secara lebih mendalam dari masalah yang belum terungkapan

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Keuangan Daerah

Keuangan daerah yaitu segala hak dan segala kewajiban daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bisa dinilai dengan uang dan juga termasuk semua kekayaan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban daerah. Ruang lingkup tentang keuangan daerah menurut peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 yaitu :

- a. Daerah mempunyai hak atas memungut pajak daerah, retribusi daerah dan juga melaukan pinjaman.
- b. Daerah mempunyai kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan juga membayar tagihan dari pihak ketiga.
- c. Pengeluaran daerah.
- d. Penerimaan daerah.
- e. Kekayaan yang dimiliki oleh suatu daerah baik itu dikelola sendiri maupun dikelola oleh orang lain atau pihak lain seperti uang, surat berharga, barang, piutang, dan juga hak lain yang bisa dinilai dengan uang.
- f. Kekayaan yang dimiliki oleh pihak lain atau bukan yang dikuasi oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah atau kepentingan bersama.

Asas pengelolaan keuangan daerah sebagaimana yang telah tercantum pada Pasal 4 No. 58 Tahun 2005 mengenai pengelolaan keuangan daerah yaitu sebagai berikut :

- a. Keuangan daerah akan dikelola dengan tertib, patuh kepada undang-undang, ekonomis, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan cara memperhatikan asas keadilan serta manfaat untuk masyarakat.
- b. Keuangan daerah dikelola dengan sistem yang terintegrasi terwujud dalam APBD dimana setiap tahunnya akan ditetapkan bersamaan peraturan daerah.

Upaya yang dilakukan agar terselenggarakannya peraturan daerah yang besar, langsung dan berkewajiban dibutuhkan pemasukan dan merencanakan penggalan pusat keuangan pribadi yang disetujui dengan membagi pemasukan antara pusat dan daerah.pendapatan daerah yaitu Setiap hak dan kewajiban daerah dalam kegiatan melakukan pemerintah yang dapat dinilai berupa materi dan seluruh bentuk harta yang berkaitan dengan hak kewajiban daerah disusun di APBD (Yani, 2002)

Pemasukan daerah sangatlah berguna bagi keseimbangan pemerintah. Disini terdapat beberapa yang telah dijelaskan oleh Lains (1985) diantaranya:

1. Kebanyakan hasil pendapatan daerah didapatkan melalui bantuan dari pemerintah pusat.
2. Perhatian yang luas dan besar oleh pemerintah pusat kepada keuangan daerah.
3. Rendahnya keuangan daerah yang bisa digunakan bagi keperluan umum.

4. Rendahnya pengaruh pajak dan PAD kepada seluruh pemasukan daerah.

Agar bisa mempunyai keungan daerah dan memenuhi dengan sendiri daerah meminta sumber pemasukan yang cukup juga. Disini daerah bisa mendapatkannya dengan cara (Purnamasari,2006), yaitu:

1. Daerah tersebut mencari sumber pemasukan pajak daerah yang telah disetujui pemerintah.
2. Pemerintah daerah juga boleh meminjam dengan cara pasar uang ataupun pemerintah.
3. Berkontribusi dalam pendapatan pajak sentral oleh daerah, contohnya sebagian kecil dari pajak tersebut.
4. Dengan cara meminta bantuan ke pemerintah pusat.

Ada delapan langkah pengelolaan aset daerah menuju pengelolaan daerah terbaik diantaranya yaitu dengan cara mengenali laporan keuangan daerah dan opini BPK, Mengenali karakteristik aset daerah, mempelajari administrasi aset daerah, melakukan perencanaan aset daerah dengan tepat, mencatat aset tetap seesuai karekteristik, mencatat persediaan aset lainnya, mengoptimalisasikan penggunaan aset daerah, dan langkah yang terakhir yaitu dengan cara menggabungkan semuanya menjadi satu.

Pemerintah daerah yaitu entitas pelaporan keuangan publik yang wajib bertanggungjawab akan tata kelola keuangan daerah kepada stakeholder yang mana telah ditetapkan pada Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 mengenai keuangan negara dan juga Undang-Undang No.1 Tahun 2004 mengenai bendahara negara. Menurut Mardiasmo dalam bukunya yang berjudul tentang

“Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah” didalam bukunya membahas arah pengembangan otonomi daerah. Pemerintah daerah yaitu salah satu dari landasan yuridis terhadap pembangunan otonomi daerah di Indonesia sebagaimana yang telah terdapat pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999. Isi dari perundangan ini menyebutkan pengembangan otonomi daerah kabupaten/kota dilakukan dengan memperhatikan prinsip demokrasi, peran dari warga, keadilan dan pemerataan, dan juga memperhatikan potensi dari keanekaragaman daerah tersebut.

Perubahan-perubahan yang dilakukan dan diinginkan untuk mengelola keuangan daerah dan juga anggaran daerah adalah :

- a. Pengelola keuangan daerah haruslah berlandaskan kepada kepentingan bersama (publik). Hal ini tidak hanya terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran kepentingan publik, melainkan juga terlihat berapa besarnya partisipasi atau keinginan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan keuangan daerah tersebut.
- b. Penjelasan mengenai tujuan dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya termasuk juga anggaran daerah pada khususnya.
- c. Desentralisasi terhadap pengelolaan keuangan daerah dan juga penjelasan tentang peran partisipan yang termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah, contohnya Sekda dan perangkat daerah lainnya.
- d. Kerangka hukum, investasi, dan juga pengelolaan keuangan daerah berlandaskan mekanisme pasar.
- e. Kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan juga pegawai daerah, baik ratio maupun dasar dari pertimbangannya haruslah ada kejelasan

- f. Ketetapan mengenai bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan juga anggaran multi tahunan.
- g. Prinsip pengadaan, pengelolaan keuangan daerah haruslah lebih profesional.
- h. Aspek pembinaan maupun pengawasan meliputi batasan pembinaan, peran asosiasi, dan peran masyarakat yang berguna untuk pengembangan profesionalisme aparat-aparat pemerintah daerah.
- i. Yang terakhir yaitu mengembangkan sistem informasi terkait keuangan daerah guna menyediakan informasi anggaran yang akurat.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah segala penerimaan-penerimaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli milik daerah tersebut dan hak dari daerah itu sendiri (Halim 2004).

1. Bagi Hasil Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak adalahh dana yang diperoleh melalui Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana yang telah terdapat pada pasal 25, Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana yang telah terdapat pada pasal 21, dan juga Pajak Penghasilan (PPh) yang telah tercantum pada pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN).

2. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam ini bersumber dari kehutanan, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan umum, pertambangan panas bumi dan pertambangan gas bumi. Setelah diterbitkan Undang-Undang No.29 Tahun 2009 mengenai pajak daerah maupun retribusi daerah, sekarang pemerintah daerah memiliki sumber dana pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah yang didapati dari pajak daerah.

3. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah suatu dana yang berasal dari bantuan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang mana dana ini bersumber dari APBN yang akan digunakan pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelaksanaan desentralisasi dan tujuan pemerintah pusat memberikan dana ini ke pemerintah daerah yaitu agar terjadinya pemerataan kemampuan keuangan daerah tersebut.

4. Dana Alokasi Khusus

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai perimbangan keuangan pusat dan daerah kemudian diganti menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang berisi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Tidak jauh beda dari dana alokasi umum, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang diberikan pemerintah pusat yang juga bersumber dari APBN kepada pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota yang mana dana ini akan digunakan daerah

untuk mendanai kegiatan Khusus yang dilakukan pemerintah daerah yang sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus disalurkan melalui memindahkan buku rekening kas umum kepada buku rekening kas daerah tersebut.

3. Pajak Daerah

Menurut para ahli ada beberapa pengertian pajak. Pajak yaitu suatu sumbangan/pungutan yang diminta pemerintah berdasarkan norma yang berlaku dan digunakan untuk kepentingan bersama dan pembangunan daerah (Usman dan K Subroto 1980). Sedangkan hasil pencarian dari kamus besar bahasa indonesia yang dimaksud dengan pajak yaitu pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain sebagainya. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut praturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Brotodiharjo, 1991).

Pajak juga bisa dipandang dari berbagai aspek. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kehidupan yang sejahtera. Pajak juga merupakan motor penggerak ekonomi masyarakat. Disudut pandang hukum, pajak merupakan masalah keuangan negara artinya diperlukan peraturan-peraturan yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur masalah keuangan di negara tersebut.

Dari sudut pandang keuangan, pajak merupakan bagian sangat penting dari penerimaan negara. Disudut pandang sosiologi pajak ditinjau dari segi masyarakat yang berhubungan akibat/dampak terhadap masyarakat atas pungutan dari pajak dan hasil yang disampaikan pada masyarakat sendiri (Waluyo dan Wirawan, 2003).

Dari beberapa definisi tentang arti pajak diatas, dapat disimpulkan bahwa pajak pajak adalah suatu penerimaan yang berpengaruh besar terhadap penerimaan negara yang berguna untuk mambangun dan kesejahteraan bersama. Sehingga juga bisa dikatakan sebagai suatu peralihan dari kekayaan masyarakat kepada kas negara yang nantinya juga akan berguna untyuk kepentingan umum.

Sebagaimana yang telah tercantum pada UU Tahun 1987 No 18, dan diubah menjadi UU Tahun 2000 Nomor 34 mengenai pajak daerah.

Pajak terdiri dari:

1. Pajak daerah tipe I (Provinsi)

Misalnya: Pajak kendaraan di Air dan juga kendaraan bermotor, pajak rokok dan lain sebagainya.

2. Pajak Daerah tipe II (daerah)

Misalnya: pajak reklame, hiburan, penerang jalan pajak, restoran, hotel dan lain sebagainya.

Bersumber dari UU Nomor 34 Tahun 2000 mengenai pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah diantaranya yaitu:

1. Pajak Restoran, dan Hotel

Dalam norma daerah nomor 3 tahun 1998 mengenai Pajak restoran dan hotel, yang disebut pajak restoran hotel yaitu sumbangan kewajiban yang diminta karena telah memakai atau menggunakan jasa yang ada di hotel dan pelayanan yang ada di restoran maupun hotel. Semakin bertambah jumlah penduduk yang melakukan liburan keluar kota dan bertambahnya PDRB perkapita penduduk maka akan banyak juga yang membutuhkan jasa hotel dan restoran artinya semakin bertambah pula penerimaan pajak yang diperoleh daerah tersebut.

2. Pajak Hiburan

Hiburan yaitu segala jenis pertunjukan, permainan, ketangkasan, maupun keramaian dalam segi apa saja yang dilihat atau dijadikan pertunjukan setiap yang melihat dan diminta bayaran, selain tempat untuk berolahraga. Subyek dari pajak ini adalah orang pribadi atau orang yang menonton atau menikmati hiburan dan obyek pajaknya yaitu semua yang terkait dalam penyelenggara hiburan tersebut. Semakin banyak bertambah industri hiburan maka akan semakin banyak pula meningkat penerimaan pajak daerah.

3. Pajak Reklame

Reklame adalah sebuah berita yang coraknya dan jenisnya untuk komersial, dan digunakan untuk agar orang banyak mengetahui jenis barang yang diperkenalkan dan agar proses penjualan akan semakin meningkat, reklame tersebut digunakan untuk memuji barang atau yang di iklankan.

Semakin banyak industri memasang reklame makan akan semakin meningkat pula penerimaan dan pemasukan pajak daerah.

4. Pajak Penerang Jalan

Pajak penerang jalan yaitu pajak atas penggunaan tenaga listrik, dengan ketentuan bahwa di daerah tersebut tersedia penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. Pajak penerang jalan umum dipungut berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2001. Subyek dari pajak ini adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik, sedangkan obyek dari pajak ini yaitu setiap pengguna tenaga listrik.

Penerang jalan tentunya harus ada bagi kenyamanan masyarakat dalam bnerkendara khususnya. Makin bertambah penduduk maka penerimaan pajak dari penerimaan penerangan jalan akan makin bertambah.

5. Pajak pengambilan bahan galian tipe C

Diperoleh melalui UU daerah nomor 5 tahun 1998. Pajak ialah sumbangan wajib yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga yang mengambil jenis pajak ini. Makin bertambahnya industri yang bergerak dibidang pengambilan bahan galian golongan C akan menambah penerimaan pajak daerah dari pendapatan pengambilan jenis pajak ini.

6. Pajak Pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah

Yaitu pajak atas setiap pemanfaatan air permukaan maupun air bawah tanah. Subjek dari pajak ini yaitu perorangan maupun lembaga yang mengambil pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah, hal ini akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.

7. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan oleh orang pribadi maupun badan, naik itu yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk juga penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor yang memungut biaya. Dengan semakin bertambahnya penduduk daerah yang menggunakan kendaraan bermotor maka seiring itu bertambah juga penerimaan pajak daerah dari hasil pajak parkir tersebut.

4. Pertimbangan untuk menilai hasil pajak daerah

Keadilan, daya guna ekonomi dan juga kecocokan sebagai sumber dari penerimaan daerah itu sendiri adalah 3 tolak ukur untuk mempertimbangkan pajak daerah (Davey 1988)

1. Keadilan (Equility)

Dasar pajak dan juga kewajiban untuk membayar pajak harus jelas dan tidak sewenang-wenang, artinya bebam pajak haruslah sama besar antar berbagai kelompok yang berbeda tetapi dengan kedudukan ekonomi yang sama dan harus adil secara vertikal artinya kelompok yang memiliki sumber daya ekonomi dan pajak haruslah adil dari tempat ketempat dalam arti harusnya tidak ada perbedaan besar dan sewenang-wenang dalam beban pajak dari satu daerah ke daerah lain, kecuali jika perbedaan ini mencerminkan perbedaan dalam cara penyediaan layanan masyarakat.

2. Daya guna ekonomi (Economic Effisiency)

Pajak seharusnya mendorong atau setidaknya tidak menghambat penggunaan sumber daya secara berdaya guna dalam kehidupan ekonomi, artinya pajak mencegah jangan sampai subyek pajak menjadi segan dalam bekerja atau menabung sehingga memperkecil penerimaan pajak.

3. Kecocokan sebagai sumber penerimaan daerah

Pajak daerah haruslah jelas kemana akan mau dibayarkan, dan tempat dimana pemungutan pajak sedapat mungkin sama dengan tempat terakhir beban pajak. Seharusnya pajak daerah tidak mempertajam perbedaan-perbedaan antar daerah dari segi potensi masing-masingnya.

5. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pajak Daerah

a. Penduduk dan Pajak Daerah

Penduduk adalah salah satu indikator yang bisa memacu pertumbuhan pembangunan, artinya jika semakin tinggi laju jumlah penduduk maka pertumbuhan pembangunan akan semakin lancar. Dan juga meningkatkan kegiatan produksi dan konsumsi dalam masyarakat yang bisa menyebabkan perekonomian akan semakin berkembang dan seiring itu juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat.

Menurut teori Hansen yang menyinggung mengenai stagnasi sekuler (secular stagnation) yang berpendapat bahwa jika jumlah penduduk semakin banyak atau meningkat maka akan meningkat juga permintaan agregatif terutama pada investasi. Penelitian ini lebih memilih teori *stewardship theory*, yang menerangkan bahwa situasi manajemen tidak terdorong oleh tujuan individu, tetapi lebih kesasaran hasil utama bagi kepentingan organisasi (Donaldson 1989

dan Davis, 1991). Dalam artian yang dimaksud yaitu pemerintah sebagai steward dan sebagai pengatur sumber daya dan rakyatlah sebagai principal selaku pemilik sumber daya. Maka pemerintah akan berupaya semaksimalnya untuk mencapai tujuan mensejahterakan rakyat.

Berdasarkan uraian dan teori yang telah dibahas diatas maka dapat disimpulkan bahwa, penambahan penduduk akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah bisa jadi itu berpengaruh positif maupun negatif. Karna tidak selamanya jumlah penduduk itu akan mempengaruhi positif penerimaan pajak, artinya pada zaman saat ini banyak penduduk yang diusia kerja yang menjadi pengangguran atau tidak memiliki pekerjaan yang tetap.

b. PDRB Perkapita dan Pajak Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator yang penting untuk mengetahui keadaan ekonomi di suatu daerah dengan satu periode tertentu, biasanya satu tahun yang ditunjukkan dengan atas dasar harga yang berlaku maupun harga konstan.

Menurut teori yang telah dikemukakan oleh Keynes menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi ialah fungsi dari pendapatan atau bisa digambarkan pada persamaan berikut:

$$Tx = f(Y) \dots \dots \dots (1)$$

Arti dari persamaan di atas mengandung makna besaran penerimaan pajak daerah dipengaruhi oleh besaran terhadap pendapatan daerah kabupaten/kota, pajak daerah dipengaruhi oleh PDRB kabupaten/kota. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi disuatu wilayah tersebut maka semakin tinggi pula pendapatan seseorang

atau pendapatan perkapita. Dan hal ini akan secara otomatis terhadap meningkatnya penerimaan pajak di daerah tersebut.

Penduduk dengan pendapatan yang lebih tinggi maka akan besar juga kemampuan bagi mereka untuk membayar kewajiban mereka (membayar pajak) diantaranya yaitu membayar pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak restoran jika restoran tersebut telah mengenakan pajak.

c. Hotel dan Pajak Daerah

Hotel adalah suatu jasa yang menyediakan tempat penginapan maupun fasilitas lainnya yang disediakan bagi pengunjungnya. Hotel juga terbagi atas dua macam yaitu hotel melati dan hotel berbintang dimana pelayanan dan servis terhadap pengunjung berbeda beda. Di kota-kota maupun di desa sudah banyak sekali dibangun hotel atau tempat penginapan, baik itu dipakai oleh turis yang pergi liburan maupun penduduk lokal. Pada penelitian yang saya lakukan ini maksud dari variabel jumlah hotel dengan Pajak daerah yaitu seberapa besar pajak dari bangunan hotel tersebut terhadap penerimaan pajak daerah artinya jika tidak adapun penduduk lokal atau penduduk asing yang menginap atau menyewa hotel tersebut maka tidak berdampak terhadap penerimaan pajak bangunan hotel tersebut untuk pendapatan daerah setempat.

Sebagaimana telah ditetapkan oleh peraturan daerah tentang pajak hotel, besaran tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Dan besaran pajak hotel yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 6.

Menurut (Sulistiyono, 2007) usaha perhotelan dapat menunjang kegiatan para wisatawan dalam melakukan perjalanan mengunjungi daerah-daerah tujuan wisata dan nantinya wisatawan membutuhkan tempat untuk menginap, makan minum serta hiburan. Menurut Mardiono pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan atau dibayarkan oleh orang pribadi maupun badan kepada daerah, tanpa imbalan langsung yg diterima, yang nantinya juga akan berguna untuk kepentingan bersama seperti pembangunan daerah dan pembangunan perekonomian yang sejahtera. Setelah melihat uraian dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak hotel atau tempat penginapan disuatu wilayah, berpengaruh positif atau signifikan terhadap penerimaan pajak daerah yang diterima. Hal ini bisa jadi disebabkan karena penerimaan pajak hotel tergantung kepada lama wisatawan atau pengunjung yang menginap dan banyaknya jumlah tamu yang memakai penginapan.

Selanjutnya hubungan hotel dengan penduduk yaitu jika jumlah hotel semakin banyak maka akan berdampak akan kenaikan pendapatan asli daerah terutama pada pajak bangunan hotel tersebut. Hubungan hotel dengan penduduk adalah salah satu nilai tambah bagi peningkatan pendapatan daerah karena jika penduduk meningkat dan keinginan penduduk untuk berwisata ketempat yang jauh dari tempat tinggalnya maka penduduk akan menyewa atau menginap di hotel, dengan bertambahnya penduduk maka kemungkinan besar juga tingkat keinginan penduduk untuk menginap di hotel tinggi dan ini juga menguntungkan bagi penerimaan pajak daerah setempat atau berhubungan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hubungan antara penduduk dengan pajak dan juga bagaimana ketika mereka tidak tidur dihotel? Dalam hal ini bisa dikatakan terjadi hubungan berkesinambungan antara penduduk dengan pajak daerah karna pajak merupakan iuran wajib yang bersifat paksaan terhadap penduduk, jadi jika seandainya penduduk tidak membayar pajak maka pendapatan daerah akan berkurang dan ini akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi daerah tersebut salah satunya tempat pariwisata, jika tempat pariwisata menurun maka akan mengakibatkan orang yang menginap dihotel juga akan menurun. Akan tetapi, sebaliknya jika masyarakat rajin membayar pajak maka akan mengakibatkan peningkatan pendapatan pajak daerah dan ini akan mengakibatkan dampak positif bagi pertumbuhan tempat-tempat pariwisata dan juga mengakibatkan pendapatan masyarakat juga akan meningkat, dan seiring pendapatan masyarakat meningkat maka akan banyak kemungkinan untuk masyarakat akan menginap dihotel begitupun wisatawan dari luar juga akan banyak berkunjung ketempat wisata tersebut dan akhirnya juga akan menginap dihotel.

A. Penelitian Terdahulu

Gupta (2007) penelitian ini berkontribusi pada literatur empiris yang ada pada penentu utama pajak kinerja pendapatan di negara-negara berkembang dengan menggunakan data set yang luas dan akuntansi untuk beberapa masalah ekonometrik yang sebelumnya diabaikan. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu PDB Perkapita, keterbukaan perdagangan, dan bantuan asing. Penelitian ini menggunakan data panel yang mencakup 105 negara berkembang selama 25 tahun. Hasil dari penelitian ini yaitu menemukan bahwa

beberapa faktor struktural seperti PDB per kapita, pangsa pertanian secara statistik signifikan dan merupakan penentu kuat kinerja pendapatan.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu terletak pada variabel lain selain PDRB perkapita yang terdapat perbedaan, selanjutnya juga terdapat pada tahun penelitian yang berbeda dimana penelitian tersebut diteliti pada tahun 2007 sedangkan penelitian saya pada tahun 2019. Perbedaan lain juga terdapat pada wilayah atau cakupan daerah yang diteliti, pada penelitian tersebut meneliti pada beberapa negara sedangkan saya meneliti pada cakupan daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Kesamaan pada penelitian saya dengan penelitian tersebut adalah sama sama meneliti dampak PDRB per kapita terhadap penerimaan pajak.

Bonham dan Gangnes (1996) Dalam penelitian ini, peneliti menulis efek pada pendapatan hotel dari pajak kamar Hawaii menggunakan analisis intervensi seri waktu. Penulis menentukan model deret waktu perilaku pendapatan yang menangkap jangka panjang kointegrasi hubungan antara pendapatan dan harga relatif, serta pengaruh dinamis jangka pendek lainnya. Peneliti memperkirakan efek dari pendapatan kamar hotel Hawaii dari pajak kamar hotel Hawaii 5% yang diperkenalkan pada bulan Januari 1987. Isi pada penelitian ini, penulis tidak menemukan atau tidak memiliki bukti dampak pajak yang signifikan secara statistik, kesimpulannya pajak atas kamar hotel telah menjadi instrumen pajak yang populer dibanyak negara bagian dan juga daerah. Mereka dipandang sebagai sumber pendapatan yang bisa diterima secara politis oleh para pendukung, tetapi sebagai beban pajak yang signifikan oleh industri perhotelan.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada jenis data yang digunakan, pada penelitian diatas penulis menggunakan data time series sedangkan saya menggunakan data panel. Perbedaan lainnya terletak pada jenis cakupan atau daerah yang diteliti, dimana pada penelitian tersebut meneliti pada cakupan negara dan tempat yang berbeda sedangkan saya meneliti pada daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. Kemudian pada tahun penelitian juga terdapat perbedaan dimana penelitian diatas pada tahun 1996 sedangkan penelitian saya pada tahun 2019. Kesamaan penelitian saya dengan penelitian diatas yaitu sama sama meneliti dampak atau pengaruh jumlah hotel terhadap penerimaan pajak.

Makdalena, Vikie, dan George (2015). Penelitian ini membahas dan menganalisis pengaruh PDRB terhadap PAD dan menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap PAD di Kota Sorong. Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode Analisis regresi berganda melalui dua variabel yaitu PDRB dengan Jumlah Penduduk. Jenis data yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan data time series dari tahun 2000-2013. Hasil penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh terhadap PAD Kota Sorong sedangkan jumlah Penduduk berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Sorong.

Perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian diatas adalah pada waktu penelitian yang mana penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2015 sedangkan saya pada tahun 2019. Selanjutnya perbedaan terdapat pada jenis data yang dipakai, pada penelitian tersebut menggunakan data time series sedangkan

saya menggunakan data panel. Selanjutnya terdapat perbedaan pada lokasi penelitian yang mana pada penelitian diatas meneliti di Kota Sorong sedangkan saya di Provinsi Sumatera Barat. Dan pada penelitian saya juga terdapat tiga variabel sedangkan pada penelitian diatas cuma dua variabel. Kesamaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan per kapita terhadap penerimaan daerah.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian Phany (2013) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak”. Maksud dari penelitian ini yaitu agar dapat menganalisis efek jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi, jumlah surat ijin usaha perdagangan (SIUP) terhadap penerimaan pajak reklame di Kabupaten Purbalingga. Teknik analisis yang digunakan yaitu regresi berganda dengan menggunakan metode (OLS). Hasil dari penelitian ini yaitu menunjukkan ada pengaruh secara bersama-sama variabel jumlah penduduk, pendapatan perkapita, inflasi dan jumlah surat ijin usaha perdagangan terhadap penerimaan pajak reklame. Pendapatan perkapita dan jumlah surat ijin usaha berpengaruh signifikan positif, sedangkan inflasi berpengaruh signifikan negatif dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak reklame.

Perbedaan penelitian saya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada tahun penelitian yang berbeda dimana saya meneliti pada tahun 2019 sedangkan pada penelitian tersebut pada tahun 2015. Selanjutnya terdapat perbedaan pada variabel-variabel yang digunakan yang terdapat perbedaan selain jumlah penduduk dan pendapatan perkapita, selanjutnya pada variabel Y juga terdapat

sedikit perbedaan yang mana pada penelitian tersebut meneliti tentang penerimaan pajak reklame sedangkan saya meneliti pada penerimaan pajak daerah. Kesamaan penelitian saya dengan penelitian diatas yaitu sama-sama meneliti pengaruh jumlah penduduk dan pendapatan perkapita terhadap penerimaan pajak.

Penelitian selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh (*Alianis dan Fafilda, 2013*) Pengaruh investasi dan jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini yaitu investasi dan jumlah penduduk sama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Padang. Perbedaan dengan penelitian saya yaitu pada variabel, cakupan penelitian dan juga tahun penelitian.

B. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berguna untuk menjelaskan lagi dan menunjukkan persepsi keterkaitan antar variabel-variabel yang akan diteliti berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang diangkat dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah, artinya jika jumlah penduduk disuatu daerah semakin banyak atau meningkat maka seiring itu penerimaan pajak daerah juga akan semakin meningkat. Dikarenakan akan besar kemungkinan membayar pajak pada daerah tersebut semakin tinggi atau semakin bertambah jumlah orang yang membayar pajak

PDRB Perkapita salah satu variabel yang diangkat dapat mempengaruhi penerimaan pajak daerah, artinya jika semakin tinggi PDRB Perkapita disuatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat penerimaan pajak didaerah tersebut dan

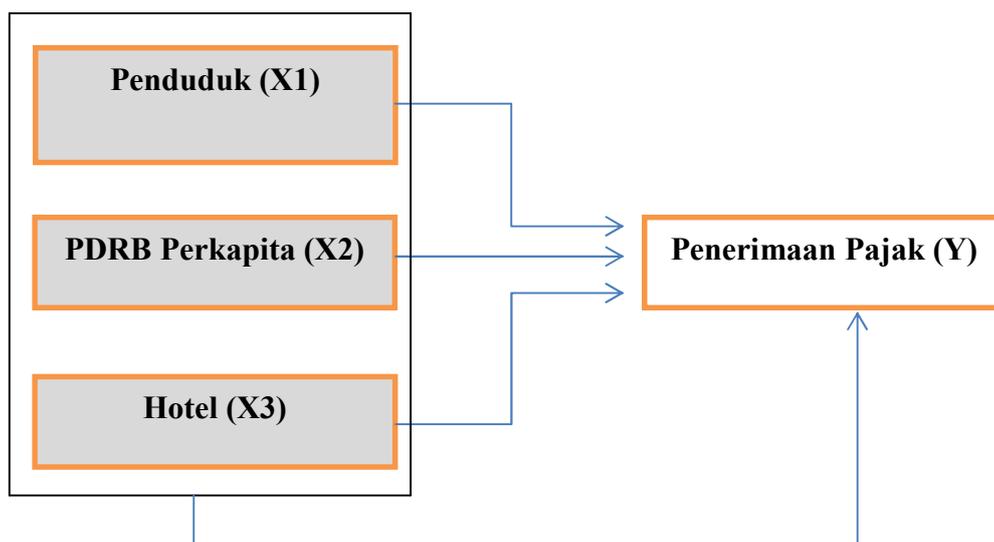
begitupun sebaliknya, hal ini dikarenakan jika PDRB Perkapita semakin tinggi maka peluang akan kebutuhan tersier seseorang tersebut akan meningkat seperti makan di restoran menginap di hotel dan lain sebagainya, dan seiring itu maka penerimaan pajak daerah akan meningkat.

Jumlah hotel salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi penerimaan pajak daerah, artinya jika hotel atau tempat penginapan di daerah tersebut makin tinggi maka semakin tinggi pula penerimaan pajak yang diterima oleh daerah tersebut dan begitupun sebaliknya. Hal ini disebabkan karena setiap yang menggunakan fasilitas hotel atau menggunakan jasa penginapan maka akan ditetapkan besaran pajak yaitu sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk lebih jelas bisa dilihat pada gambar kerangka konseptual berikut:

Gambar. 1

Kerangka Konseptual



C. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu jawaban atau anggapan yang bersifat sementara atau disebut juga dengan dugaan sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai akhirnya terbukti melalui data yang terkumpul.

Dalam penelitian ini, hipotesis dikemukakan dengan tujuan yang mengarah serta memberi pedoman bagi penelitian yang dilakukan. Apabila hipotesis ternyata tidak terbukti, maka masalah bisa dipecahkan dengan kebenaran yang ditentukan oleh keputusan yang berhasil dijalankan selama ini.

Dalam penelitian ini hopotesisnya yaitu sebagai berikut:

1. Variabel jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Variabel PDRB Perkapita berpengaruh kepada pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Variabel jumlah hotel berpengaruh kepada pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Variabel jumlah penduduk, PDRB Perkapita dan jumlah hotel secara bersama-sama berpengaruh kepada pendapatan pajak daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

$$H_0 : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 : \beta_2 : \beta_3 \neq 0$$

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil Analisis Regresi Model Panel yang menggunakan Fixed Effect Model dan juga pembahasan hasil penelitian antara variabel bebas dan variabel terikat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya oleh penulis, maka kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti menunjukkan peningkatan jumlah penduduk diikuti oleh peningkatan pendapatan pajak daerah.
2. PDRB Perkapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti akan menunjukkan bahwa peningkatan PDRB Perkapita diiringi juga oleh peningkatan pendapatan pajak daerah.
3. Banyaknya hotel berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini berarti jumlah hotel tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan pajak daerah.

4. Jumlah penduduk, PDRB Perkapita, dan jumlah hotel secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan, maka dapat diartikan bahwa,
5. Apabila terjadi perubahan yang positif kesemua variabel independent tersebut maka akan berdampak bagi penerimaan pajak daerah.

B. SARAN OPERASIONAL

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan mengenai dampak Jumlah total Penduduk, PDRB Perkapita dan banyaknya Hotel kepada pendapatan pajak daerah di Provinsi Sumatera Barat maka dapat dikemukakan beberapa saran dari penulis yaitu sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memperhatikan peningkatan jumlah penduduk karna penduduk sebenarnya sangat berperan penting bagi kesejahteraan daerah atau kesejahteraan bersama, dan juga pemerintah harus lebih memantau kembali dengan ketat bagi warga-warga yang tidak membayar kewajibannya sebagaimana mestinya contohnya membayar pajak, terutama yang penulis liat bahwa banyak sekali di Provinsi Sumatera Barat orang yang tidak membayar pajak kendaraan kususnya. Dan masih banyak juga masyarakat yang tidak menaati aturan. Karna warga yang taat aturan dan selalu membayar pajak baik itu pajak kekayaan maupun pajak lainnya yang tercantum pada uu akan berdampak positif bagi pendapatan daerah atau bagi penerimaan pajak daerah. Seharusnya pemerintah lebih memperbanyak menciptakan

lapangan pekerjaan agar penduduk yang usia kerja mendapatkan pekerjaan dan tidak kewajiban membayar pajak.

2. Selanjutnya pemerintah hendaklah memperhatikan warga-warga kecil atau warga yang tinggal dipelosok yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan pekerjaan yang layak. Salah satunya yaitu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum bekerja. Selalu memantau bagaimana perusahaan-perusahaan dalam menerima karyawan atau tenaga kerja yang melamar hendaknya di seleksi dengan seadil-adilnya, yang sepantasnya bisa bekerjalah yang diterima artinya banyak sekali yang penulis liat bahwa yang memiliki orang dalam di suatu perusahaan maka akan semakin besar kemungkinannya di perusahaan tersebut. Karna semua orang butuh pekerjaan jangan sampai terjadi yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin, kalau bisa semua warga merasakan kesejahteraan dalam hidupnya. Sebab semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin tinggi juga harapan orang tersebut dalam membayar pajak, dan ini akan diiringi juga oleh penerimaan pajak daerah.

3. Bagi pemerintah memberi kebijakan bagi pengusaha-pengusaha agar tidak sembarangan dalam membangun tempat penginapan atau hotel, karna apabila hotel dibangun terus menerus dan yang menginap di hotel tersebut tidak ada maka penerimaan pajak dari hotel tersebut juga bakalan tidak dan ini tidak akan mempengaruhi peningkatan pendapatan daerah. Sebaiknya bangunlah hotel

penginapan di Kota-kota besar atau di daerah yang memiliki tempat wisata yang banyak dan disukai oleh para turis atau pengunjung dari luar daerah, karna tempat yang banyak wisata akan banyak juga dikunjungi oleh orang lain dan ini akan membutuhkan bagi para tamu untuk menginap dihotel.

4. Dalam memperhatikan sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat baik itu secara parsial maupun secara bersama-sama, ternyata masih ada banyak faktor lainnya yang belum teruji dalam penelitian ini yang juga ikut memengaruhi pendapatan pajak daerah, karna sifat manusia tidaklah luput dari kesalahan dan kekurangan. Maka darai itu, penulis berharap untuk peneliti selanjutnya yang ingin meneliti dapat menguji variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini kedalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.
5. Jika pemerintah daerah mengharapkan PAD dari pajak hotel disaat masa pandemic seperti saat sekarang ini maka saya menyarankan agar pemerintah lebih menekankan kepada pihak hotel agar tetap selalu menaati protokol kesehatan dan selalu menyediakan atribut agar terhindar dari virus seperti masker, tempat cuci tangan dll. Saya sarankan seperti ini agar seluruh masyarakat yang ingin menginap dihotel tersebut tidak takut dan merasa lebih aman dari penularan virus tersebut dan akan membuat pengunjung kembali meningkat menginap dihotel hal ini juga diiringi lagi akan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

DAFTAR PUSTAKA

- Aliandi, V. D. A., & Handayani, H. R. (2013). Pengaruh Jumlah Wisatawan, Jumlah Hotel, dan Tingkat Hunian Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Hotel (Studi Kasus pada Kota Yogyakarta). *Diponegoro Journal Of Economics*, 2(4), 1–14.
- Basyarudin. (2018). Диф нарушениями No Title. *Высшей Нервной Деятельности*, 2, 227–249.
- Mispiyanti, M., & Kristanti, I. N. (2018). Analisis Pengaruh Pdrb, Inflasi, Nilai Kurs, Dan Tenaga Kerja Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Kebumen Dan Purworejo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 7(1), 23–37.
<https://doi.org/10.32639/jiak.v7i1.159>
- No Title. (2013). 1, 13293.
- Sania, H. (2018). Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 74–86. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.68>
- Sari, D. P., & Ilyas, F. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 75–85. <https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.6.1.75-85>
- Aliandi, Vidya Dwi Anggitasari & Handayani, H. R. (2013). PENERIMAAN